

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi yang melanda Negara Republik Indonesia sejak tahun 1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau sektor kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya sektor privat seperti pasar modal tetapi juga pada sektor publik (pemerintah) seperti Pemerintah Daerah. Dampak yang terjadi lebih bersifat dampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun ada pula yang berdampak positif seperti meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi yang berakibat meningkatnya pendapatan para penghasil komoditi tersebut.

Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pula pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (kab/kota).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada hakekatnya adalah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk

menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan keadaan riil masyarakat sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencerminkan dari kebijakan tersebut terungkap dari komposisi komponen APBD.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu

memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk dilakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya Pemerintah Daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Alokasi sumberdaya dalam mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi melalui berbagai teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam publik *expenditure management*.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi

(kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Kesenambungan pemerintah daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir dari penelitian yang dilakukan Priyo Hari Adi dan David Harianto (2007) dan menyesuaikan untuk kondisi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah baik kabupaten Semarang, Demak maupun kota Semarang sendiri yang bertujuan untuk mengetahui alokasi dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas pelayanan publik.

Penelitian ini berusaha mengetahui adanya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Darwanto dan Yulia Yustikasari 2007, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari obyek yang akan diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten/Kota Se- Jawa Bali sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Dalam bidang akademis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah realisasi anggaran Belanja Modal dan dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini Pemerintah Daerah baik kabupaten dan kota dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

##### **2.1.1. Anggaran Daerah Sektor Publik**

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter.

##### **a. Fungsi anggaran :**

###### **1. Alat Perencanaan**

Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana, dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

###### **2. Alat Pengendalian**

Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan-pemborosan pengeluaran. Berdasarkan anggaran yang diajukan, pemerintah menyajikan rencana detail tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus dipertanggung jawabkan kepada publik.

###### **3. Alat Kebijakan Fiskal**

Sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sektor publik digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi, yang akan mendorong memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat

sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Alat Politik

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak-pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

#### 5. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Sebagai alat koordinasi, anggaran sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

#### 6. Alat Penilai Kinerja

Sebagai alat kinerja, anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislatif sebagai pemberi wewenang. Kinerja pihak eksekutif sebagai pihak manajer publik dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

#### 7. Alat Pemotivasi

Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### 8. Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Sebagai alat untuk menciptakan, anggaran sektor publik merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

### **b. Jenis anggaran :**

#### 1. Anggaran Operasional

Anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional. Belanja operasi adalah belanja

yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambahkan aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non-investasi, pembayaran bunga, hutang, subsidi, dan belanja operasional.

## 2. Anggaran Modal /Investasi

Anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot kantor. Belanja modal merupakan bagian dari anggaran modal/investasi.

### **c. Proses Penyusunan Anggaran**

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk :

1. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. membantu menciptakan efisien dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **d. Faktor dominan dalam proses penganggaran:**

- Tujuan dan target yang hendak dicapai.
- Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah.
- Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, serta bencana alam. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002). Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan



keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Penganggaran atau proses penyusunan anggaran publik memiliki karakteristik berbeda dengan penganggaran dalam bisnis. Karakteristik tersebut mencakup (1) ketersediaan sumberdaya, (2) motif laba, (3) barang publik, (4) eksternalitas, (5) penentuan harga pelayanan publik, dan (6) perbedaan lain seperti intervensi pemerintah terhadap perekonomian melalui anggaran, kepemilikan atas organisasi, dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatan keputusan.

### **2.1.2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

Proses penyusunan anggaran dalam anggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteleiti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasar urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan respon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Proses penyusunan anggaran penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteliti oleh

tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

### **2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibanding apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat, dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoretikus tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, nrasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas. (Arsyad, 1999).

PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (*industrial origin*). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi juga lain lagi.

Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi perhitungan ganda (*double counting*) atau bahkan *multiple counting*. Akibatnya PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal di atas maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara.

$$NT = NO - NI$$

Dimana :

NT = Nilai Tambah

NO = Nilai Output

NI = Nilai Input antara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produk (output) dikurangi 1 (satu) dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapat (upah dan gaji) bunga sewa, tanah dan keuntungan. Dengan menghitung nilai tambah tersebut dapat diketahui jumlah PDRB nya.

#### **2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Perangkat Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (pendapat) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas

pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lain.

### **2.1.5. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut (**Sidik**, 2003) :

1. Salah satu komponen dan perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau selisih fiskal yang selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal *imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan peningkatan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah otonomi dan pembangunan daerah (Mudrajad Kuncoro, Ph. D)

DAU yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk Kabupaten / Kota.

Bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil dan sebaliknya. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

### **2.1.6. Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investai permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja modal meliputi belanja perolehan investasi permanen dan belanja pembelian aset tetap.

### **2.1.7. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan setara maksudnya kedudukan yang sama dan sejajar serta tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan bermakna bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

### **2.1.8. Peraturan Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah diwadahi dalam tiga kelompok yaitu lembaga sekretariat, lembaga teknis daerah, lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusun perangkat daerah dalam organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani, meskipun tidak setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

### **2.1.9. Pengertian Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

### **2.1.10. Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006). Dalam penelitian Syukiri Abdullah (2004) menyebut hubungan eksekutif/birokrasi dengan legislatif/kongres dengan nama *self-interest model*.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Selama dua dekade terakhir peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik dan penganggaran semakin meningkat. Dalam penelitian Syukiri Abdullah 2004 menyatakan bahwa penganggaran adalah sebuah proses legislatif. Apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran, pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif.

Dalam penelitian Syukiri Abdullah (2002) menyatakan bahwa peran penting legislatif adalah mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislatif berkemampuan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan

pemerintah. Sementara menurut Harvens (dalam penelitian Syukiri Abdullah dan Jhon Andra Asmara, 2006) tidak ada keharusan bagi legislatif untuk mempunyai preferensi yang sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran.

### **2.1.11 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (*Voters*)**

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik (*voters*), legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007). Dalam hal pembuatan kebijakan, Darwanto dan Yulia Yustikasari berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi

kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

#### **2.1.12 Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia**

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

#### **2.1.13 UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah**

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dalam perkembangannya, pemerintahan telah mengalami transformasi paradigma yang kesemuanya dimaksudkan untuk membangun peradaban suatu bangsa. Transformasi paradigma pemerintahan meliputi beberapa aspek antara lain; perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), perubahan paradigma dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, dan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralisasi pengelolaan pemerintahan. Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki paradigma tata pemerintahan yang baik. Untuk dapat memahaminya dengan segala



dimensinya, maka pada sesi ini terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi tentang tata pemerintahan yang baik.

#### **A. Definisi *Government*, *Governance* dan *Good Publik Governance***

Secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai “pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat.

*Governance* merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. *UN Commission on Human Settlements* (1996) menjelaskan bahwa *governance* adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka.

Hal ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dimana segala jenis kepentingan maupun kebutuhan dapat diakomodasikan dan tindakan korektif diterapkan. Termasuk pula didalamnya lembaga dan regim formal yang dikuasakan untuk menegakkan kepatuhan, maupun pengaturan secara informal sehingga masyarakat dan lembaga memiliki kesepakatan atau kesamaan kepentingan.

*Governance* juga dapat diungkapkan oleh Prof. Dr. Mustopadidjaja AR (2003) sebagai:

- 1) pemerintahan,
- 2) pengelolaan pemerintahan,
- 3) penyelenggaraan pemerintahan,
- 4) penyelenggaraan negara, dan
- 5) administrasi negara.

Istilah *governance* lebih kompleks karena melibatkan tiga komponen *stakeholders*, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling

kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. *good public governance*.

Istilah *good public governance* mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau pun administrasi negara yang baik. Istilah tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

## **B. Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik**

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

tata pemerintahan yang baik.

Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **C. Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik**

Dari telusuran keberagaman wacana tata pemerintahan yang baik, terdapat sekumpulan nilai yang perlu diterapkan di Indonesia. Sebagian dari nilai tersebut sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar budaya masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kembali diterapkan dalam kehidupan kita, hanya saja istilah dan kemasannya yang berbeda. Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Wawasan ke Depan (*Visionary*);
2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*);

3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*);
4. Tanggung Gugat (*Accountability*);
5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*);
6. Demokrasi (*Democracy*);
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Profesionalism and Competency*);
8. Daya Tanggap (*Responsiveness*);
9. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*);
10. Desentralisasi (*Decentralization*);
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*);
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*);
13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*);
14. Komitmen pada Pasar yang *Fair* (*Commitment to Fair Market*).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Syukiry Abdullah dan Abdul Halim (2003) menggunakan sampel 90 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali. Alasan pemilihan sampel di lima propinsi ini adalah relatif memiliki karakteristik ekonomis dan geografis yang sama, ketersediaan data dan dipandang sudah mewakili populasi pemda dipulau Jawa dan Bali, yang secara teoritis dan empiris memiliki perbedaan dengan pemda diluar jawa-bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan tanpa lag pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD.

Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) melakukan penelitian dengan sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah se Jawa-Bali baik kabupaten dan tata dari tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah sampling atau sampel bertujuan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Penelitian oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) dengan populasi dan sampel adalah daerah kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah daerah kabupaten dan kota ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda di luar Jawa-Bali. Tahun data yang digunakan dalam penelitian adalah dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Data penelitian diperoleh penelitian ini menggunakan alat analisis Diskripsi dan analisis jalur hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yang menyatakan bahwa Belanja Pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita. Penelitian ini mendukung pernyataan BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Mutiara Maimunah (2006) menggunakan populasi daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera dengan data PAD, DAU, Belanja Daerah (belanja bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum) dan total Belanja. Data tersebut adalah data dari kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian adalah dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkecimpung dengan masalah

anggaran dalam hal ini adalah APBD.

Penelitian oleh Priyo Hari Adi (2006), sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive* atau sampel bertujuan hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah

Penelitian Syukriy Abdullah (2004) menghasilkan bahwa DPRD membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber pembiayaan untuk usulan kegiatan baru. Pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif dengan demikian tidak didasarkan pada prioritas anggaran.

### 2.2.1. TABEL PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti	Hasil
Abdul Halim dan Syukiry Abdullah (2003)	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan maupun tanpa log. Ketika tidak digunakan log, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD.
Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)	Hasil pengujian terhadap Hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel/belanja modal.
Priyo Hari Adi dan David Harianto (2007)	– Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yang menyatakan bahwa Belanja Pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita. Penelitian ini mendukung pernyataan BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>
Mutiara Maimunah (2006)	Hasil penelitian ini seperti telah dikemukakan pada kesimpulan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkecimpung dengan masalah anggaran. Dalam hal ini adalah APBD.
Priyo Hari Adi (2006)	Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten dan Kota Se-Jawa-Bali mengingat adanya kesamaan karakteristik. Oleh karena itu, bisa jadi daya generalisasi penelitian ini rendah. Meskipun demikian studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel daerah di luar Pulau Jawa. Perbedaan karakteristik yang melekat ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan
	komparasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja, maupun kinerja PAD. Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Syukriy Abdullah (2004)	Hasil penelitian ini DPRD membuat keputusan anggaran melalui penggunaan kenaikan anggaran PAD sebagai sumber

	pembiayaan untuk usulan kegiatan baru. Pengalokasian anggaran yang diusulkan legislatif dengan demikian tidak didasarkan pada prioritas anggaran.
--	---

### **2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Sejak diterapkannya desentralisasi sentral, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (sidiketal, 2002). Setiap transfer DAU yang diterima daerah daerah akan ditunjukkan untuk belanja Pemda, maka tidak jarang Pemda menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencan cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar.

Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Hal ini memerlukan pengkajian lebih mendalam, baik secara empiris maupun praktik. Misalnya dengan melihat kebijakan Pemda terhadap upaya meningkatkan PAD segera setelah otonomi daerah diberlakukan. Peningkatan Pemda dalam investasi modal/belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercemin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi daaerah.

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan



ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya maka bisa diindikasikan adanya eksplotasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktivitas masyarakat itu sendiri (sidik, 2002).

Dalam era desentralisasi fiskal kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; saragih, 2003; Bappenas, 2003).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Sayangnya kontribusi dari DAU terhadap belanja modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata (masih banyak desa terbelakang di daerah Jawa dan Bali).

### **2.3.1. Hipotesis Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi

lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).

Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

**H1** : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Temuan ini mengkonfirmasi pendapar Colombatto (2001).

Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H2** : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah di dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan

desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

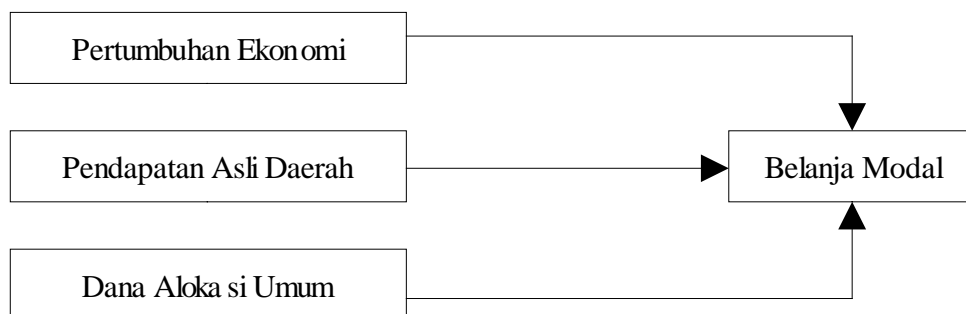
Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

**H3** : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

### 2.3.2. Kerangka Pikir Penelitian

**Gambar 2.3.2**

**Kerangka Pikir Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena, empiris.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2006 dengan alasan ketersediaan data. Alasan pemilihan sampel ini adalah daerah Provinsi ini memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang unik. Dengan keterbatasan SDA, Provinsi Jawa Tengah ini relatif mengandalkan potensi penerimaan lain, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi (Kuncoro, 2004).

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan cara *purposive sampling* atau sampel bertujuan yaitu peneliti kemungkinan mempunyai target atau tujuan tertentu dalam memilih sampel ini adalah secara tidak acak.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara, data ini didapat dari daftar pustaka atau literatur yang terdahulu. yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran

Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode dokumentasi merupakan data yang digunakan melalui studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku atau bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.5. Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut:

- Belanja modal  
Adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset).
- Pertumbuhan ekonomi  
Adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.
- PAD (Pendapatan Asli Daerah)  
Adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- DAU (Dana Alokasi Umum)  
Adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

### 3.6. Teknis Analisis

#### 3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik, data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu, sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari :

##### 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusikan secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data dan titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) di atas 10 (Ghozali, 2001). Tabel di bawah menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas yang terjadi pada variabel PDRB, PAD dan DAU dimana nilai *tolerance*-nya di atas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. hal ini menunjukkan bahwa antar variabel-variabel tersebut tidak terdapat korelasi sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.

##### 3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (*dw test*). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung

autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel *error term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel *erroe term* pada periode lain bermakna variabel *error term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat.

#### 4. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan penyerbaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan gambar plot antara nilai produksi variabel independen (ZPRED) dengan residulnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas.

### 3.6.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Persamaan regresi adalah:

$$Y = a + b_1PDRB + b_2PAD + b_3DAU + e \quad (1)$$

Dimana :

Y	=	Belanja Modal (BM)
a	=	Konstanta
b	=	Slope atau koefisien regresi atau intersep
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	=	Dana Alokasi Umum (DAU)
e	=	<i>error</i>

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Deskripsi Obyek Penelitian**

Hasil analisa Deskripsi Obyek Penelitian dapat dilihat pada deskriptif statistik dibawah ini yang menjadi sampel penelitian adalah Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah Realisasi Pertahunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Propinsi Jawa Tengah tahun 2005 dan 2006.

**4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Berikut ini disajikan tabel PDRB :

Tabel 4.1

Rata-rata PDRB untuk kabupaten dan kota se Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2005-2006 (jutaan rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PAD
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp 4,525.38
2	Kabupaten Banyumas	Rp 3,850.93
3	Kabupaten Batang	Rp 4,733.45
4	Kabupaten Blora	Rp 3,164.18
5	Kabupaten Boyolali	Rp 5,148.58
6	Kabupaten Brebes	Rp 4,244.53
7	Kabupaten Cilacap	Rp 38,198.68



8	Kabupaten Demak	Rp	3,422.48
9	Kabupaten Grobogan	Rp	2,767.50
10	Kabupaten Jepara	Rp	4,933.33
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp	7,245.73
12	Kabupaten Kebumen	Rp	2,993.00
13	Kabupaten Kendal	Rp	6,765.00
14	Kabupaten Klaten	Rp	5,949.10
15	Kabupaten Kudus	Rp	26,888.83
16	Kabupaten Magelang	Rp	4,153.30
17	Kabupaten Pati	Rp	4,822.63
18	Kabupaten Pekalongan	Rp	4,917.95
19	Kabupaten Pemasang	Rp	3,471.68
20	Kabupaten Purbalingga	Rp	3,678.73
21	Kabupaten Purworejo	Rp	4,932.30
22	Kabupaten Rembang	Rp	4,374.70
23	Kabupaten Semarang	Rp	7,545.03
24	Kabupaten Sragen	Rp	4,194.30
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp	7,036.63
26	Kabupaten Tegal	Rp	2,795.18
27	Kabupaten Temanggung	Rp	4,189.18
28	Kabupaten Wonogiri	Rp	3,585.45
29	Kabupaten Wonosobo	Rp	3,157.00

30	Kota Magelang	Rp	10,484.73
31	Kota Pekalongan	Rp	9,104.05
32	Kota Salatiga	Rp	7,672.13
33	Kota Semarang	Rp	16,638.83
34	Kota Surakarta	Rp	11,264.75
35	Kota Tegal	Rp	6,213.55
Jumlah		Rp	249,062.70

Sumber : data yang sudah diolah 2009

Berikut ini disajikan tabel analisis data statistik deskriptif Pertumbuhan ekonomi :

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif Pertumbuhan ekonomi Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2006

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pdrb	70	2700.00	39130.35	7116.0771	7041.15336
Valid N (listwise)	70				

Sumber : Data yang sudah diolah, 2009

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui Pertumbuhan ekonomi terkecil pada Kabupaten Grobogan tahun 2005 yaitu sebesar Rp 2.700.000.000,- dan Pertumbuhan ekonomi yang terbesar pada Kabupaten Cilacap tahun 2006 yaitu sebesar Rp 39.130.350.000,- dan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar Rp 7.116.077.100,- dengan standar deviasi sebesar 7.041,15336

#### 4.1.2. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan daerah yang terpisah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah. Berikut ini disajikan tabel Pendapatan Asli Daerah :

Tabel 4.3

Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah  
tahun 2005-2006

No.	Kabupaten/Kota	PAD
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 28,595.14
2	Kabupaten Banyumas	Rp. 53,145.39
3	Kabupaten Batang	Rp. 19,260.82
4	Kabupaten Blora	Rp. 30,192.53
5	Kabupaten Boyolali	Rp. 40,669.06
6	Kabupaten Brebes	Rp. 32,121.19
7	Kabupaten Cilacap	Rp. 78,337.40
8	Kabupaten Demak	Rp. 22,547.64
9	Kabupaten Grobogan	Rp. 36,858.10
10	Kabupaten Jepara	Rp. 53,069.67
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp. 31,334.73
12	Kabupaten Kebumen	Rp. 31,281.71
13	Kabupaten Kendal	Rp. 43,861.49
14	Kabupaten Klaten	Rp. 34,869.25
15	Kabupaten Kudus	Rp. 43,813.43
16	Kabupaten Magelang	Rp. 48,826.64
17	Kabupaten Pati	Rp. 51,621.60

18	Kabupaten Pekalongan	Rp.	23,447.09
19	Kabupaten Pemalang	Rp.	33,805.03
20	Kabupaten Purbalingga	Rp.	34,895.46
21	Kabupaten Purworejo	Rp.	30,161.78
22	Kabupaten Rembang	Rp.	9,963.38
23	Kabupaten Semarang	Rp.	51,629.05
24	Kabupaten Sragen	Rp.	33,782.11
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp.	27,328.30
26	Kabupaten Tegal	Rp.	44,401.86
27	Kabupaten Temanggung	Rp.	35,530.39
28	Kabupaten Wonogiri	Rp.	34,376.53
29	Kabupaten Wonosobo	Rp.	22,555.51
30	Kota Magelang	Rp.	25,113.61
31	Kota Pekalongan	Rp.	14,485.84
32	Kota Salatiga	Rp.	24,785.09
33	Kota Semarang	Rp.	176,452.96
34	Kota Surakarta	Rp.	68,896.88
35	Kota Tegal	Rp.	49,265.50
Jumlah		Rp.	1,421,282.06

Sumber : Data yang sudah diolah, 2009

Berikut ini disajikan tabel analisis data statistik deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.4  
 Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pad	69	12838.81	199284.81	41196.58	27955.47932
Valid N (listwise)	69				

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah terbesar pada Kota Semarang yaitu sebesar Rp. 199.284.810.000,- sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang terkecil terjadi pada Kabupaten Rembang yaitu sebesar Rp. 12.838.810.000,- dan rata-rata Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.41.196.580.000,- dengan standar deviasi sebesar 27.955,47932

#### 4.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Berikut ini disajikan tabel Dana Alokasi Umum (DAU) :

Tabel 4.5

Rata-Rata Dana Alokasi Umum Seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2005-2006

No.	Kabupaten/Kota	DAU
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp 401,383.84
2	Kabupaten Banyumas	Rp 573,692.18
3	Kabupaten Batang	Rp 316,762.00
4	Kabupaten Blora	Rp 389,570.67
5	Kabupaten Boyolali	Rp 467,572.28
6	Kabupaten Brebes	Rp 579,117.44
7	Kabupaten Cilacap	Rp 628,199.97
8	Kabupaten Demak	Rp 388,029.90
9	Kabupaten Grobogan	Rp 487,196.29
10	Kabupaten Jepara	Rp 383,030.38

11	Kabupaten Karang Anyar	Rp	400,360.46
12	Kabupaten Kebumen	Rp	509,854.76
13	Kabupaten Kendal	Rp	388,831.68
14	Kabupaten Klaten	Rp	603,713.49
15	Kabupaten Kudus	Rp	341,224.64
16	Kabupaten Magelang	Rp	477,797.81
17	Kabupaten Pati	Rp	484,094.16
18	Kabupaten Pekalongan	Rp	358,510.17
19	Kabupaten Pemasang	Rp	466,718.11
20	Kabupaten Purbalingga	Rp	364,728.92
21	Kabupaten Purworejo	Rp	410,412.01
22	Kabupaten Rembang	Rp	325,638.36
23	Kabupaten Semarang	Rp	391,844.72
24	Kabupaten Sragen	Rp	443,508.85
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp	400,366.31
26	Kabupaten Tegal	Rp	485,027.26
27	Kabupaten Temanggung	Rp	339,931.02
28	Kabupaten Wonogiri	Rp	497,267.35
29	Kabupaten Wonosobo	Rp	341,737.11
30	Kota Magelang	Rp	205,258.73
31	Kota Pekalongan	Rp	199,168.33
32	Kota Salatiga	Rp	176,157.57

33	Kota Semarang	Rp	488,121.83
34	Kota Surakarta	Rp	317,572.84
35	Kota Tegal	Rp	179,557.10
Jumlah		Rp	14,211,958.50

Sumber : Data yang sudah diolah, 2009

Berikut ini disajikan tabel analisis data statistik deskriptif Dana Alokasi Umum (DAU) :

Tabel 4.6

Hasil Statistik Deskriptif Dana Alokasi Umum (DAU)  
Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2005-2006

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
dau	70	166886.12	661263.13	406056.0	114254.43864
Valid N (listwise)	70				

Sumber : Data yang sudah diolah, 2009

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui Dana Alokasi Umum (DAU) terkecil pada Kota Salatiga tahun 2005 yaitu sebesar Rp.166.886.120.000,- dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terbesar pada Kabupaten Cilacap tahun 2006 yaitu sebesar Rp.661.263.130.000,- dan rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp.406.056.000.000,- dengan standar deviasi sebesar 114.254,43864

#### 4.1.4. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan untuk investai permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan

pemerintahdan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal yang digunakan adalah realisasi Belanja Modal Seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini disajikan tabel analisis data statistik deskriptif Belanja Modal :

Tabel 4.7

Rata-Rata Belanja Modal Seluruh Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah  
tahun 2005-2006

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Belanja Modal</b>
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp 72,653.60
2	Kabupaten Banyumas	Rp 77,038.06
3	Kabupaten Batang	Rp 37,530.74
4	Kabupaten Blora	Rp 47,289.39
5	Kabupaten Boyolali	Rp 61,321.10
6	Kabupaten Brebes	Rp 103,095.50
7	Kabupaten Cilacap	Rp 117,946.16
8	Kabupaten Demak	Rp 28,476.11
9	Kabupaten Grobogan	Rp 93,532.40
10	Kabupaten Jepara	Rp 85,698.58
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp 63,331.70
12	Kabupaten Kebumen	Rp 111,677.69
13	Kabupaten Kendal	Rp 114,494.02
14	Kabupaten Klaten	Rp 62,928.23
15	Kabupaten Kudus	Rp 95,443.95
16	Kabupaten Magelang	Rp 27,964.54



17	Kabupaten Pati	Rp 66,827.22
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 42,289.61
19	Kabupaten Pemalang	Rp 62,414.74
20	Kabupaten Purbalingga	Rp 61,548.85
21	Kabupaten Purworejo	Rp 34,446.74
22	Kabupaten Rembang	Rp 8,341.37
23	Kabupaten Semarang	Rp 53,393.96
24	Kabupaten Sragen	Rp 80,036.29
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 61,723.39
26	Kabupaten Tegal	Rp 98,270.84
27	Kabupaten Temanggung	Rp 53,728.21
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 99,198.52
29	Kabupaten Wonosobo	Rp 79,005.07
30	Kota Magelang	Rp 33,143.25
31	Kota Pekalongan	Rp 42,629.15
32	Kota Salatiga	Rp 45,356.15
33	Kota Semarang	Rp 79,680.57
34	Kota Surakarta	Rp 35,212.08
35	Kota Tegal	Rp 67,961.72
Jumlah		Rp 2,305,629.42

Sumber : Data yang sudah diolah, 2009

Berikut ini disajikan tabel analisis data statistik deskriptif Belanja Modal

Tabel 4.8

Hasil Statistik Deskriptif Belanja Modal  
Seluruh Kota dan Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2005-2006 (dalam Jutaan Rupiah)

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
b_modal	69	7194.98	148240.41	66829.84	34529.70185
Valid N (listwise)	69				

Sumber : Data yang sudah diolah, 2009

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui Belanja Modal terkecil pada Kabupaten Rembang tahun 2005 yaitu sebesar Rp.7.194.980.000,- dan Belanja Modal yang terbesar pada Kabupaten Kendal tahun 2006 yaitu sebesar Rp.148.240.410.000,- dan rata-rata Belanja Modal adalah sebesar Rp.66.829.840.000,- dengan standar deviasi sebesar 34.329,70185

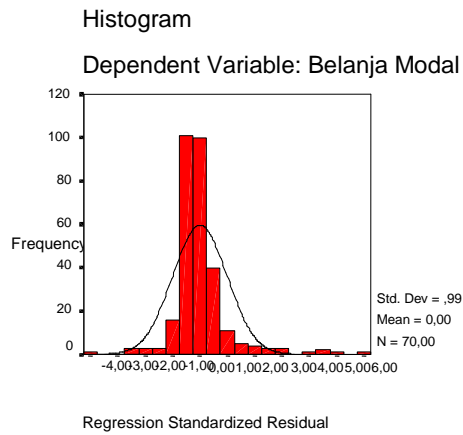
#### 4.2. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan :

1. Uji Grafik

Analisis Grafik yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Gambar 4.1  
Kurva Normal Belanja Modal

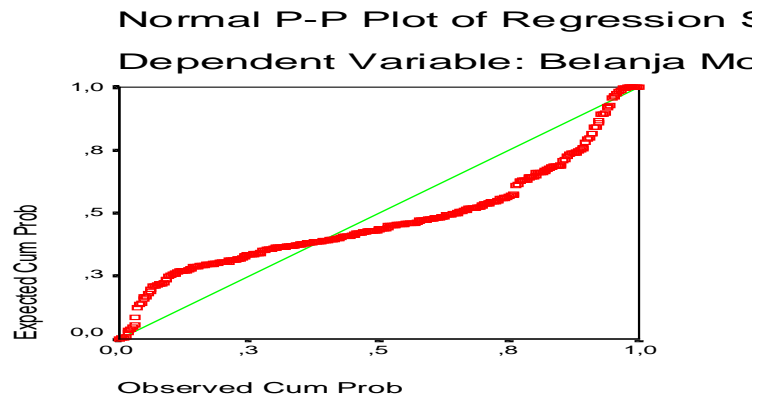


Pada gambar 4.1 kurva normal di atas terlihat bahwa data belanja modal terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, 2002:76) yaitu tidak cenderung ke kiri maupun ke kanan, melainkan memiliki kecenderungan di tengah.

## 2. Kurva Normal

Untuk mengetahui data berdistribusi secara normal dilakukan uji normalitas P-Plot, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dapat dikatakan normal. Berikut gambar normalitas pada model Scatterplot.

Gambar 4.2 : Normal P-Plot Belanja Modal



Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

### 4.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi yaitu adanya korelasi antar variabel bebas/independen. Multikolinieritas dalam penelitian diukur berdasarkan tingkat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Dari hasil pengujian model regresi diperoleh hasil untuk masing-masing variabel sebagai berikut :

Tabel 4.9

Hasil Output SPSS : Uji Multikolinearitas (VIF-Tolerance)

Variabel	Tolerance	VIF
PDRB	0,810	1,234
PAD	0,748	1,337
DAU	0,913	1,096

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10% (persen). Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

#### 4.3.2. Autokorelasi

Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik dari Durbin Watson. Langkah awal pendeteksian ini adalah mencari nilai  $d_1$  dan  $d_u$  pada tabel dengan kriteria, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.10  
 Hasil Output SPSS : Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,980	49814,20070	1,824

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, PDRB

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder yang diolah

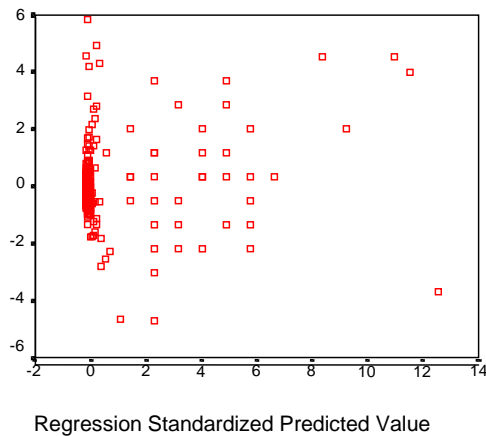
Hasil uji Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 1,824. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% (persen), jumlah sampel 298, Variabel bebas (k) = 3, Nilai Tabel Durbin Watson  $d_l = 1,615$  dan  $d_u = 1,692$ . Nilai DW terletak diantara batas atas  $d_u$  dan  $(4-d_u)$ ,  $1,692 < 1,824 < 2,308$  maka hasilnya tidak ada Autokorelasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut layak untuk diuji lebih lanjut.

**4.3.3. Uji Heteroskedastisitas**

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan Analisis Grafik Plot. Hasil grafik Scatterplot adalah sebagai berikut :

### Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal



Gambar 4.3 : Grafik Plot

Berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Belanja Modal berdasarkan variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) dan Dana Alokasi Umum (DAU) (X3).

#### 4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi model SPSS 11 untuk masing-masing variabel yaitu dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah dengan model persamaan regresi linier berganda. Berikut adalah hasil olahan data :

Tabel 4.11  
Hasil Analisis Regresi Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18609,308	7341,694		2,535	,012		
	PDRB	7,374E-04	,000	,082	2,769	,006	,810	1,234
	PAD	,545	,017	,907	31,315	,000	,748	1,337
	DAU	3,688E-02	,020	,016	2,866	,006	,913	1,096

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 18609,308 + 0,0007374 X_1 + 0,545 X_2 + 0,03688 X_3 + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa

- a. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan ekonomi (PDRB) ( $b_1$ ) sebesar 0,0007374 dan bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dengan Belanja Modal berbanding lurus, bila Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.
- b. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $b_2$ ) sebesar 0,545 dan bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal berbanding lurus, bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.
- c. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) ( $b_3$ ) sebesar 0,03688 dan bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal berbanding lurus, bila Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

## 4.5. Pengujian Hipotesis

### 4.5.1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Modal. Kriteria pengujian Taraf uji signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05



Dengan  $d.f = n - 2$  maka Nilai t Tabel menunjukkan 1,968

1. Pengujian Hipotesis pertumbuhan ekonomi (X1) Terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan t-hitung (2,769) > t-tabel (1,968) atau sig t (0,006) di bawah 0,05 dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal pada taraf uji signifikan 0,05.

2. Pengujian Hipotesis Pendapatan Asli Daerah (X2) Terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan t-hitung (31,315) > t-tabel (1,968) atau sig t (0,000) di bawah 0,05 dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada taraf uji signifikan 0,05.

3. Pengujian Hipotesis Dana Alokasi Umum (X3) Terhadap Belanja Modal (Y)

Dari hasil perhitungan t-hitung (2,866) > t-tabel (1,968) atau sig t (0,006) di bawah 0,05 dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada taraf uji signifikan 0,05.

#### 4.5.2. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal. Kriteria pengujian Taraf uji signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05 Dengan  $d.f = n - k - 1$  maka Nilai F Tabel menunjukkan 2,635

Tabel 4.12

Hasil Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,64E+13	3	1,213E+13	4886,914	,000 <sup>a</sup>
	Residual	7,30E+11	294	2481454591		
	Total	3,71E+13	297			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, PDRB

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari hasil perhitungan F-hitung ( $4886,914$ ) > F tabel ( $2,635$ ) atau sign ( $0,000$ ) <  $\alpha=0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah terhadap Belanja Modal pada taraf uji signifikan  $0,05$

**4.6. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berikut ini disajikan hasil analisis koefisien determinasi yang dapat dilihat pada table 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.13

Hasil Nilai Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,980	49814,20070	1,824

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, PDRB

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Analisis Koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar  $0,98$  atau sebesar  $98$  persen berarti variasi perubahan Belanja Modal dipengaruhi oleh pertumbuhan

ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 98% sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor lain.

#### **4.7. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Modal, hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung dan nilai F-hitung yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

##### **4.7.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal, hal ini di tunjukkan sig  $(0,006) < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007)

Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penerimaan daerah.

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Modal ayat 1 berbunyi “Belanja Modal digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*.

#### **4.7.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini di tunjukkan sig (0,000) < 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hal ini mengindikasikan Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam Belanja Modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik di Sumatera, Jawa dan Bali akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

#### **4.7.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan dengan  $\text{sig} (0,006) < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hal ini mengindikasikan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan t-hitung (2,769) > t-tabel (1,968) atau sig t (0,006) di bawah 0,05 dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan t-hitung (31,315) > t-tabel (1,968) atau sig t (0,000) di bawah 0,05 dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan t-hitung (2,866) > t-tabel (1,968) atau sig t (0,006) di bawah 0,05 dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hasil perhitungan hasil perhitungan F-hitung (4886,914) > F tabel (3,285) atau sign (0,000) <  $\alpha=0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi dan PAD mengalami kenaikan maka Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan.
5. Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai R square sebesar 0,98 atau sebesar 98 persen berarti variasi perubahan Belanja Modal dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 98% sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor lain

## 5.2. Saran

1. Pendapatan yang diperoleh dari Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan, maka kebijakan yang ditetapkan adalah:
  - a. Pemerintah Kota atau Kabupaten secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
  - b. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.
2. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat misalnya
  - a. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
  - b. Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah akan



berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian nasional.

- c. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
  - d. Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi.
3. Belanja Modal diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja Modal harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kemungkinan untuk perkembangan penelitian sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini kurang dapat diberlakukan bagi daerah di luar Provinsi Jawa Tengah.
2. Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel daerah di luar Propinsi Jawa Tengah atau seluruh Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.

3. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan PAD. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis sektoral untuk memastikan sektor belanja manakah yang meningkatkan penerimaan terbesar dan yang sebaliknya.
4. Penelitian hanya dilakukan pada era desentralisasi fiskal yaitu data tahun 2005–2006, sehingga belum tentu memberikan gambaran yang lebih komperhensif terkait dengan pertumbuhan pendapatan per Kapita. Penelitian dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan dampak dari kebijakan desentralisasi yang lebih nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy. 2004. "Perilaku Oportunis Legislatif dan Penganggaran Daerah : Pendekatan Principal-Agent Theory". *Seminar Antar Bangsa di Universitas Bengkulu*, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1 – 26.
- Drs. Suparmoko, M. Ph. D, M. A. 2002. "*Keuangan dan Pembangunan Daerah*". Ekonomi Publik : Penerbit Andi.
- Drs. Tarigan, M. R. P. 2005. "*Teori dan Aplikasi*". Ekonomi Regional : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2001. "Analisis Deskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah". *KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta*, 127 – 146.
- Halim, Abdul dan Sukriy Abdullah. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140 -1159.
- Kuncoro, Mudrajad. Ph. D. 2004. "*Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*". Otonomi dan Pembangunan Daerah : Penerbit Erlangga.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1- 26.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005. "*Suatu Pengantar*". Teori Ekonomi Makro : Penerbit FE UI.
- Yustikasari, Yulia dan Darwanto. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1 – 25.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah

Lampiran 1

**Data Statistik Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)  
Di Kabupaten dan Kota se-Provinsi JawaTengah  
Tahun 2005-2006 (dalam jutaan Rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp 4,525.38
2	Kabupaten Banyumas	Rp 3,850.93
3	Kabupaten Batang	Rp 4,733.45
4	Kabupaten Blora	Rp 3,164.18
5	Kabupaten Boyolali	Rp 5,148.58
6	Kabupaten Brebes	Rp 4,244.53
7	Kabupaten Cilacap	Rp 38,198.68
8	Kabupaten Demak	Rp 3,422.48
9	Kabupaten Grobogan	Rp 2,767.50
10	Kabupaten Jepara	Rp 4,933.33
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp 7,245.73
12	Kabupaten Kebumen	Rp 2,993.00
13	Kabupaten Kendal	Rp 6,765.00
14	Kabupaten Klaten	Rp 5,949.10
15	Kabupaten Kudus	Rp 26,888.83
16	Kabupaten Magelang	Rp 4,153.30
17	Kabupaten Pati	Rp 4,822.63

18	Kabupaten Pekalongan	Rp	4,917.95
19	Kabupaten Pemalang	Rp	3,471.68
20	Kabupaten Purbalingga	Rp	3,678.73
21	Kabupaten Purworejo	Rp	4,932.30
22	Kabupaten Rembang	Rp	4,374.70
23	Kabupaten Semarang	Rp	7,545.03
24	Kabupaten Sragen	Rp	4,194.30
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp	7,036.63
26	Kabupaten Tegal	Rp	2,795.18
27	Kabupaten Temanggung	Rp	4,189.18
28	Kabupaten Wonogiri	Rp	3,585.45
29	Kabupaten Wonosobo	Rp	3,157.00
30	Kota Magelang	Rp	10,484.73
31	Kota Pekalongan	Rp	9,104.05
32	Kota Salatiga	Rp	7,672.13
33	Kota Semarang	Rp	16,638.83
34	Kota Surakarta	Rp	11,264.75
35	Kota Tegal	Rp	6,213.55
Jumlah		Rp	249,062.70

**Data Statistik Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Di Kabupaten dan Kota se-Provinsi JawaTengah  
Tahun 2005-2006 (dalam jutaan Rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 28,595.14
2	Kabupaten Banyumas	Rp. 53,145.39
3	Kabupaten Batang	Rp. 19,260.82
4	Kabupaten Blora	Rp. 30,192.53
5	Kabupaten Boyolali	Rp. 40,669.06
6	Kabupaten Brebes	Rp. 32,121.19
7	Kabupaten Cilacap	Rp. 78,337.40
8	Kabupaten Demak	Rp. 22,547.64
9	Kabupaten Grobogan	Rp. 36,858.10
10	Kabupaten Jepara	Rp. 53,069.67
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp. 31,334.73
12	Kabupaten Kebumen	Rp. 31,281.71
13	Kabupaten Kendal	Rp. 43,861.49
14	Kabupaten Klaten	Rp. 34,869.25
15	Kabupaten Kudus	Rp. 43,813.43
16	Kabupaten Magelang	Rp. 48,826.64
17	Kabupaten Pati	Rp. 51,621.60
18	Kabupaten Pekalongan	Rp. 23,447.09
19	Kabupaten Pemalang	Rp. 33,805.03
20	Kabupaten Purbalingga	Rp. 34,895.46
21	Kabupaten Purworejo	Rp. 30,161.78
22	Kabupaten Rembang	Rp. 9,963.38
23	Kabupaten Semarang	Rp. 51,629.05

24	Kabupaten Sragen	Rp.	33,782.11
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp.	27,328.30
26	Kabupaten Tegal	Rp.	44,401.86
27	Kabupaten Temanggung	Rp.	35,530.39
28	Kabupaten Wonogiri	Rp.	34,376.53
29	Kabupaten Wonosobo	Rp.	22,555.51
30	Kota Magelang	Rp.	25,113.61
31	Kota Pekalongan	Rp.	14,485.84
32	Kota Salatiga	Rp.	24,785.09
33	Kota Semarang	Rp.	176,452.96
34	Kota Surakarta	Rp.	68,896.88
35	Kota Tegal	Rp.	49,265.50
Jumlah		Rp.	1,421,282.06



**Data Statistik Dana Alokasi Umum (DAU)  
Di Kabupaten dan Kota se-Provinsi JawaTengah  
Tahun 2005-2006 (dalam jutaan Rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>DAU</b>
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp 401,383.84
2	Kabupaten Banyumas	Rp 573,692.18
3	Kabupaten Batang	Rp 316,762.00
4	Kabupaten Blora	Rp 389,570.67
5	Kabupaten Boyolali	Rp 467,572.28
6	Kabupaten Brebes	Rp 579,117.44
7	Kabupaten Cilacap	Rp 628,199.97
8	Kabupaten Demak	Rp 388,029.90
9	Kabupaten Grobogan	Rp 487,196.29
10	Kabupaten Jepara	Rp 383,030.38
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp 400,360.46
12	Kabupaten Kebumen	Rp 509,854.76
13	Kabupaten Kendal	Rp 388,831.68
14	Kabupaten Klaten	Rp 603,713.49
15	Kabupaten Kudus	Rp 341,224.64
16	Kabupaten Magelang	Rp 477,797.81
17	Kabupaten Pati	Rp 484,094.16
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 358,510.17

19	Kabupaten Pemalang	Rp	466,718.11
20	Kabupaten Purbalingga	Rp	364,728.92
21	Kabupaten Purworejo	Rp	410,412.01
22	Kabupaten Rembang	Rp	325,638.36
23	Kabupaten Semarang	Rp	391,844.72
24	Kabupaten Sragen	Rp	443,508.85
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp	400,366.31
26	Kabupaten Tegal	Rp	485,027.26
27	Kabupaten Temanggung	Rp	339,931.02
28	Kabupaten Wonogiri	Rp	497,267.35
29	Kabupaten Wonosobo	Rp	341,737.11
30	Kota Magelang	Rp	205,258.73
31	Kota Pekalongan	Rp	199,168.33
32	Kota Salatiga	Rp	176,157.57
33	Kota Semarang	Rp	488,121.83
34	Kota Surakarta	Rp	317,572.84
35	Kota Tegal	Rp	179,557.10
Jumlah		Rp	14,211,958.50

**Data Statistik Belanja Modal**  
**Di Kabupaten dan Kota se-Provinsi JawaTengah**  
**Tahun 2005-2006 (dalam jutaan Rupiah)**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Belanja Modal</b>
1	Kabupaten Banjarnegara	Rp 72,653.60
2	Kabupaten Banyumas	Rp 77,038.06
3	Kabupaten Batang	Rp 37,530.74
4	Kabupaten Blora	Rp 47,289.39
5	Kabupaten Boyolali	Rp 61,321.10
6	Kabupaten Brebes	Rp 103,095.50
7	Kabupaten Cilacap	Rp 117,946.16
8	Kabupaten Demak	Rp 28,476.11
9	Kabupaten Grobogan	Rp 93,532.40
10	Kabupaten Jepara	Rp 85,698.58
11	Kabupaten Karang Anyar	Rp 63,331.70
12	Kabupaten Kebumen	Rp 111,677.69
13	Kabupaten Kendal	Rp 114,494.02
14	Kabupaten Klaten	Rp 62,928.23
15	Kabupaten Kudus	Rp 95,443.95
16	Kabupaten Magelang	Rp 27,964.54
17	Kabupaten Pati	Rp 66,827.22
18	Kabupaten Pekalongan	Rp 42,289.61

19	Kabupaten Pemalang	Rp 62,414.74
20	Kabupaten Purbalingga	Rp 61,548.85
21	Kabupaten Purworejo	Rp 34,446.74
22	Kabupaten Rembang	Rp 8,341.37
23	Kabupaten Semarang	Rp 53,393.96
24	Kabupaten Sragen	Rp 80,036.29
25	Kabupaten Sukoharjo	Rp 61,723.39
26	Kabupaten Tegal	Rp 98,270.84
27	Kabupaten Temanggung	Rp 53,728.21
28	Kabupaten Wonogiri	Rp 99,198.52
29	Kabupaten Wonosobo	Rp 79,005.07
30	Kota Magelang	Rp 33,143.25
31	Kota Pekalongan	Rp 42,629.15
32	Kota Salatiga	Rp 45,356.15
33	Kota Semarang	Rp 79,680.57
34	Kota Surakarta	Rp 35,212.08
35	Kota Tegal	Rp 67,961.72
Jumlah		Rp 2,305,629.42

Lampiran 2

**Descriptive Statistics All Variable**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
b_modal	69	7194.98	148240.41	66829.84	34529.70185
pdrb	70	2700.00	39130.35	7116.0771	7041.15336
pad	69	12838.81	199284.81	41196.58	27955.47932
dau	70	166886.12	661263.13	406056.0	114254.43864
Valid N (listwise)	69				

**Descriptive Statistics\_PDRB**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pdrb	70	2700.00	39130.35	7116.0771	7041.15336
Valid N (listwise)	70				

**Descriptive Statistics\_PAD**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pad	69	12838.81	199284.81	41196.58	27955.47932
Valid N (listwise)	69				

**Descriptive Statistics\_DAU**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
dau	70	166886.12	661263.13	406056.0	114254.43864
Valid N (listwise)	70				

**Descriptive Statistics\_Belanja Modal**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
b_modal	69	7194.98	148240.41	66829.84	34529.70185
Valid N (listwise)	69				

Lampiran 3

**UJI ASUMSI KLASIK**

a. Uji Multikolonieritas

**Variables Entered/Removed<sup>d</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	dau <sub>a</sub> pdrb, pad	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: b\_modal

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18609,308	7341,694		2,535	,012		
	PDRB	7,374E-04	,000	,082	2,769	,006	,810	1,234
	PAD	,545	,017	,907	31,315	,000	,748	1,337
	DAU	3,688E-02	,020	,016	2,866	,006	,913	1,096

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Uji Autokorelasi

**Variables Entered/Removed<sup>d</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	dau <sub>a</sub> pdrb, pad	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: b\_modal

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,980	49814,20070	1,824

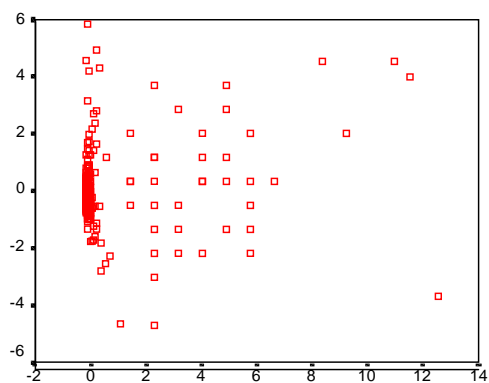
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, PDRB

b. Dependent Variable: Belanja Modal

c. Uji Heteroskedastisitas

### Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal



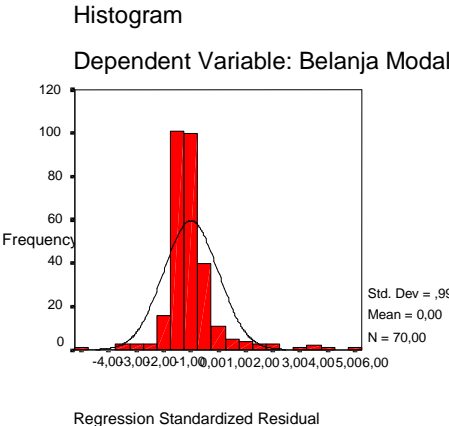
Regression Standardized Predicted Value

Lampiran 4

**UJI NORMALITAS**

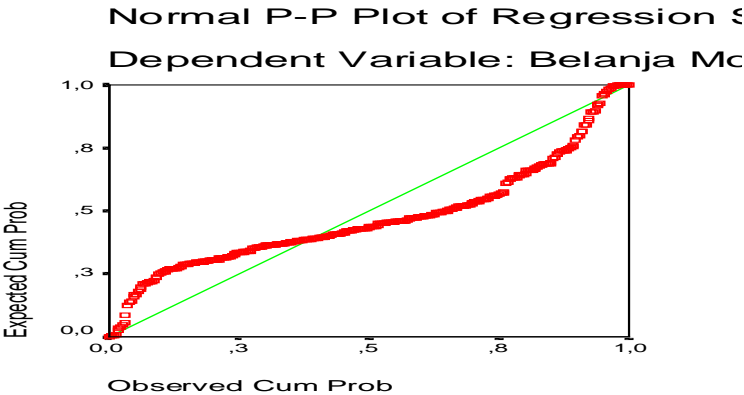
1. Uji Grafik

**Kurva Normal Belanja Modal**



2. Kurva Normal

**Normal P-Plot Belanja Daerah**





## ANALISIS REGRESI BERGANDA

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	dau <sub>a</sub> , pdrb, pad	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: b\_modal

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18609,308	7341,694		2,535	,012		
	PDRB	7,374E-04	,000	,082	2,769	,006	,810	1,234
	PAD	,545	,017	,907	31,315	,000	,748	1,337
	DAU	3,688E-02	,020	,016	2,866	,006	,913	1,096

a. Dependent Variable: Belanja Modal

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,64E+13	3	1,213E+13	4886,914	,000 <sup>a</sup>
	Residual	7,30E+11	294	2481454591		
	Total	3,71E+13	297			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, PDRB

b. Dependent Variable: Belanja Modal

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,980	49814,20070	1,824

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD, PDRB

b. Dependent Variable: Belanja Modal